

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* DAN PERMENDAGRI NO.1 TAHUN
2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA TERHADAP
ALIH FUNGSI TANAH KAS DESA DI GAYAM BOJONEGORO
SKRIPSI**

Oleh

Aulia Gigih Sofie Sabnabilla

NIM. C95215074



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aulia Gigih Sofie Sabnabilla

NIM : C95215074

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Siyāsah* dan Permendagri No.1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa terhadap Alih Fungsi Tanah
Kas Desa di Gayam Bojonegoro

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juni 2019

Saya yang menyatakan,



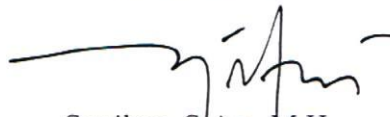
Aulia Gigih Sofie Sabnabilla
NIM. C95215074

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Aulia Gigih Sofie Sabnabilla NIM. C95215074 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Juni 2019

Pembimbing



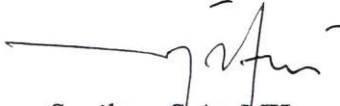
Suvikno, S. Ag., M.H
NIP. 197307052011011001

PENGESAHAN

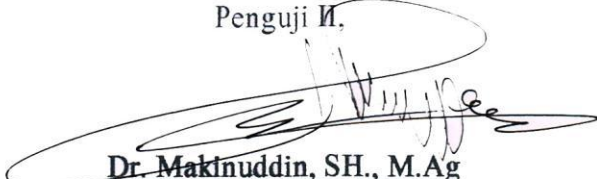
Skripsi yang ditulis oleh Aulia Gigih Sofie Sabnabilla NIM.C95215074 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I,


Suyikno, S.Ag, MH
NIP.197307052011011001


Penguji II,


Dr. Maknuddin, SH., M.Ag
NIP. 195711101996031001

Penguji III,


M. Romdlon, S.H, M.Hum
NIP. 196212291991031003

Penguji IV,



Siti Tatmainnol Qulub, M.Si
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 18 Juli 2019

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya




Dr. H Masruhan, M.Ag.
NIP.19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aulia Gigih Sofie Sabnabilla
NIM : C95215074
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : Asabnabilla@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Tipografi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

***ANALISIS FIQH SIYASAH DAN PERMENDAGRI NO.1 TAHUN 2016 TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA TERHADAP ALIH FUNGSI TANAH KAS DESA DI
GAYAM BOJONEGORO***

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Juli 2019

Penulis

(Aulia Gigih Sofie .S.)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyāsah* dan Permendagri No.1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa terhadap Alih Fungsi Tanah Kas Desa di Gayam Bojonegoro” ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana pengelolaan tanah kas desa di Gayam Bojonegoro? 2) Bagaimana analisis *fiqh siyāsah* terhadap pengelolaan tanah kas desa di Gayam Bojonegoro? 3) Bagaimana analisis Permendagri No.1 Tahun 2016 terhadap pengelolaan tanah kas desa di Gayam Bojonegoro ?

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu, *pertama*, Pengumpulan data, yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi, langkah *kedua* yaitu tahap analisis data, yang menggunakan teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang sistematis dan faktual terhadap fokus penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, tanah kas desa digunakan untuk pengembangan eksploitasi minyak dan gas bumi. Kedua, dalam mengganti tanah kas tersebut tidak memperhatikan dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016. Tanah Kas Desa Gayam yang digunakan untuk eksploitasi minyak dan gas bumi memiliki luas sekitar 128,538m² dengan nilai appraisal Rp 73,167,290,000, diganti dengan 67 (enam puluh tujuh) bidang tanah dengan nilai total appraisal Rp 73,021,988,100. Ketiga, berkaitan dengan tinjauan *Fiqh Siyāsah* yakni *Al-Sulthah al-Tanfidiyyah* yakni melaksanakan undang-undang, dalam hal ini pemerintah Desa Gayam tidak melaksanakan undang-undang dengan baik. *Siyāsah māliyah* yakni *Baitul Māl* yang bertugas untuk mengawasi kekayaan negara yakni pemasukan ataupun pengeluaran pemerintah desa, pemerintah Desa Gayam Bojonegoro sudah melaksanakan dengan baik. Pemasukan dari lelang tanah kas desa digunakan untuk pembangunan desa.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada Pemerintah Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro diharapkan lebih memperhatikan peraturan maupun undang-undang tentang pengelolaan aset Desa agar lebih sesuai dan tidak menyimpang dengan aturan yang ada.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Penelitian	12
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TEORI <i>FIQH SIYĀSAH</i> DAN PERMENDAGRI NO.1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA	21
A. <i>Fiqh Siyāṣah</i>	21
B. <i>Siyasah Maliyah</i>	35
C. Permendagri No.1 tahun 2016.....	40
BAB III PENGELOLAAN ASET DESA TERHADAP ALIH FUNGSI TANAH KAS DESA DI GAYAM BOJONEGORO	48
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	48

Berkenaan dengan luasnya ruang lingkup Hukum Tata Negara Islam, maka ada beberapa pembedaan yaitu : *fiqh dustūriyah*, *fiqh māliyah*, *fiqh dauliyyah* dan *fiqh ḥarbiyah*.³ *Fiqh siyāsah* yang digunakan untuk penelitian ini yaitu *fiqh siyāsah dustūriyah* karena *fiqh siyāsah dustūriyah* adalah berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antar penguasa dengan rakyat.⁴

Negara Indonesia yang lahir pada 17 agustus 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah atau wilayah provinsi dan setiap daerah atau wilayah provinsi terdiri dari beberapa daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya di dalam setiap daerah kabupaten atau kota terdapat satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintahan kabupaten atau kota.

³ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: CV Cahaya Intan Xii, 2014), 8.

Menurut R.H Unang Soenardjo, Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya yakni yang pertama, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan. Yang kedua, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama. Yang ketiga memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.⁶

⁵ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta : Erlangga 2011), 1.

Dari data yang didapat jumlah Desa di Indonesia sejumlah 74.754 Desa sedangkan Kelurahan 8.430. Ini berarti bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekitar 89% berupa pemerintahan Desa dan hanya sekitar 11% berupa pemerintahan kelurahan yang bersifat seperti perkotaan. Berdasarkan data tersebut maka kedudukan desa sangat penting sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan Negara Republik Indonesia. Sebagai lembaga pemerintahan, Desa merupakan lembaga yang dapat memperkuat lembaga pemerintahan nasional karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa telah terbukti memiliki daya tahan yang luar biasa sepanjang keberadaannya. Sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, desa telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan dan yang sangat dihormati dan dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan.

⁷Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 tentang Desa

biasa dikenal (DPRD). Pembentuk, penghapusan, dan atau penggabungan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam Pembentukan, penghapusan, dan atau penggabungan Desa perlu dipertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, sosial budaya, potensi desa, dan lain-lain.⁸

Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri. Kewenangan Desa secara substantif mengandung beberapa hal. Yang pertama keleluasaan Desa mengatur rumah tangga dan penduduk untuk menciptakan keteraturan dan kepastian. Yang kedua, fungsi desa mengurus atau mengelola barang-barang publik termasuk pelayanan publik untuk kesejahteraan warga desa. Yang ketiga, hak desa mengelola atau mengambil sumber daya ekonomi. Yang keempat, tanggung jawab atau akuntabilitas atas keputusan dalam mengatur dan mengurus desa.⁹

Perbedaan desa dengan kelurahan ialah dimilikinya kekayaan desa. Desa sebagai badan hukum mempunyai sebuah kekayaan. Dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 pasal 1 ayat 9. Yang dimaksud kekayaan desa adalah barang milik desa yang berasal dari Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.¹⁰ Jenis kekayaan desa meliputi :

a. Tanah Kas Desa:

⁸ Daddy Supriady Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2002), 24.

⁹ Rahma Yabbar, *Tata Kelola Pemerintahan Desa* (Surabaya:Penerbit Pustaka 2015), 45-46.

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 pasal 1 ayat 9

- b. Pasar Desa;
- c. Pasar hewan;
- d. Tambatan Perahu;
- e. Bangunan Desa;
- f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;¹¹

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 76.

Aset desa dapat berupa:

- a. Tanah Kas Desa;
- b. Tanah Ulayat;
- c. Pasar Desa;
- d. Pasar Hewan;
- e. Tambatan Perahu;
- f. Bangunan Desa;
- g. Pelelangan Ikan;
- h. Pelelangan hasil Pertanian;
- i. Hutan milik Desa;
- j. Mata air milik Desa;
- k. Pemandian Umum dan aset yang lainnya milik Desa.¹²

¹¹Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Jakarta: Erlangga 2011), 94.

¹²Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 76

Disini yang dimaksud aset lainnya milik Desa yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 77 antara lain:

- a. Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja Daerah, serta anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- b. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- c. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Hasil kerja sama desa; dan
- e. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Salah satu kekayaan desa adalah tanah kas desa. Tanah kas desa adalah barang milik desa yang berupa tanah bengkok atau tanah lingguh, pengarem-arem, titisara, kuburan, jalan-jalan desa, pengembalaan hewan, danau-danau, tanah pasar desa, tanah keramat, lapangan-lapangan, dan tanah yang dikuasai oleh pemerintah desa.

Tanah kas desa yang berada di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro digunakan untuk pengelolaan perkembangan eksploitasi minyak dan gas bumi. Pada tahun 2010, konflik pertanahan

penggunaan Tanah Kas Desa Gayam Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu konflik tukar guling yang berlarut atau memiliki jangka waktu konflik yang terbilang lama. Tanah yang digunakan untuk mengembangkan proyek eksploitasi minyak dan gas bumi atau yang dikenal sebagai proyek EPC 1 Banyu Urip ini membawa serta kepentingan tanah seluas 700 Ha, yang mana didalamnya terdapat tanah Kas Desa Gayam Kabupaten Bojonegoro seluas 13,20 Ha.

Di dalam musyawarah antara SKK Migas yang mana menjadi operator negara dengan pihak pemerintahan desa. Tanah kas desa yang digunakan oleh dan dioperatori oleh SKK Migas akan diganti dengan tanah yang telah disepakati ketika musyawarah. Namun dalam proses ini ada indikasi atau ketidakadilan dalam mengganti tanah.

Disebutkan Peraturan Menteri Dalam Negeri pasal 42 ayat 3 (a) tukar menukar tanah milik desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar. Dari hal tersebut, perlu adanya penelitian lebih mendalam terkait proses pengganti tanah kas desa dan peraturan undang-undang yang mengatur hal ini.

umum dan keuangan yang mana bagian tersebut sebagian diambil dari tanah ganjaran kepala dusun.¹⁵

E. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan penyusunan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penggunaan Tanah Kas Desa untuk *Exxon Mobile* di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro
2. Untuk mengetahui *fiqh siyāsah* terhadap pengelolaan tanah kas desa di Gayam Bojonegoro
3. Untuk mengetahui Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 terhadap Pengelolaan Tanah Kas Desa di Gayam Bojonegoro

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan keilmuan tentang hukum positif ataupun hukum Islam khususnya terkait Penggunaan Tanah Kas Desa

¹⁵Siti Nurhayati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pengalihan Hak Pengelolaan Tanah Kas Desa Dengan Keputusan Perdes di Kediri (Studi Kasus di Desa Cendono Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)” (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna agar diterapkan dalam pengaturan Penggunaan Tanah Kas Desa agar dijadikan pedoman atau pertimbangan.

G. Definisi Operasional

Untuk memahami terkait judul penelitian ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud yang terkandung maka peneliti menguraikan gambaran umum atau kata kunci sebagai berikut:

1. Tanah Kas Desa yang disingkat TKD adalah Tanah Milik Desa yang merupakan kekayaan desa dan diperuntukkan bagi sumber pendapatan dan pembiayaan penyelenggaraan pembangunan pemerintahan desa di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.
2. *Fiqh Siyāsah* adalah ilmu yang mempelajari *hal-ihwal* dan seluk beluk pengaturan-pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁶

fiqh māliyah merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, di dalam kajian tersebut antara lain dibahas tentang sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluaran negara.

¹⁶ J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 26.

mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut.¹⁸

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.¹⁹ Adapun bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu terdiri dari peraturan perundang undangan yang meliputi:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 3) Konsep *Fiqh Siyāsah*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer.²⁰ Yaitu berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan

¹⁸Soeratno, Lincollin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN* (Yogyakarta:2008), 70.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press, 2007), 52.

²⁰Ibid.

a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran nyata suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Observasi dilakukan di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.²²

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data responden.²³

c. Dokumentasi

Data dokumentasi adalah berupa naskah-naskah atau berkas-berkas yang bersumber atau berkaitan dengan subyek yang diteliti.²⁴

4. Teknis Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yaitu

²²Ibid.

²³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta:Granit,2004), 72.

²⁴ Irfan tamwif, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 221.

Bab kedua memuat landasan tentang teori yang akan digunakan menganalisis yakni *Fiqh Siyāsah*, yang mana dalam menggunakan teori *fiqh siyāsah dustūrīyah* dan Permendagri 2016 terkait pengelolaan aset desa yakni tanah kas desa Bojonegoro

Bab ketiga memuat penyajian data hasil di lapangan dan Tanah Kas Desa di Gayam Bojonegoro. Dalam bab ini juga beberapa hal pokok yaitu deskripsi Desa Gayam Kecamatan

Bab ketiga memuat penyajian data hasil di lapangan dan Tanah Kas Desa di Gayam Bojonegoro. Dalam bab ini juga beberapa hal pokok, yaitu deskripsi Desa Gayam Kecamatan Kabupaten Bojonegoro, dengan menguraikan keadaan geografi, demografi serta wilayah dan keberadaan Pemerintah Desa mengenai pengelolaan aset desa di Desa Gayam Kecamatan Kabupaten Bojonegoro

Bab keempat memuat analisis tentang aset desa yang tersebut adalah Tanah Kas Desa (TKD) di Desa Gayam Kecamatan Bojonegoro

Bab kelima merupakan bab terakhir yang memuat penutup yakni kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Pada bab lima ini juga akan dikemukakan jawaban atas rumusan masalah dan berisi saran-saran baik yang bermanfaat bagi penulis maupun bagi lembaga-lembaga yang terkait secara umum.

**TEORI *FIQH SIYĀSAH* DAN PERMENDAGRI NO 1 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA**

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Kata *siyāsah* berasal dari kata *sāsa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pembuatan kebijaksanaan dan pemerintahan politik. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyāsah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.² Ibn ‘Abid al-Diin mendefinisikan bahwa *siyāsah* adalah kemashlahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang

²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam...*,3.

menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyāsah* berasal daripada nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin.³

dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁵

c. *Siyāsah māliyah* (politik keuangan dan moneter)

Bidang ini membahas mengenai sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁸

3. Pengertian *Siyāṣah Dustūrīyyah*

Kata “dusturi” berasal dari bahasa Persia yang artinya seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Lalu mengalami perkembangan, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan atau pemuka agama Zoroaster (majusi). Setelah itu mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata “*dustur*” berkembang artinya menjadi asas dasar atau pembinaan. Dalam istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).⁹

Permasalahan di dalam *fiqh siyāsah dustūrīyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta

⁸ Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara...*, 16.

⁹ Ibid., 22.

¹² Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi...*, 28.

perintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat”. Konsep dari *fiqh siyāsah dustūrīyyah* dapat digolongkan menjadi dua bagian yakni:

- a. Al-quran dan Hadist yang dijadikan pedoman didalam segala bidang yang mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum maupun untuk ahlak manusia.
- b. *Ulil amri*, kebijakan *ulil amri* berdasarkan pertimbangan ulama' dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat demi terciptannya kemashlahatan bersama.

Persoalan terkait tentang pengelolaan tanah kas desa melalui peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan kaidah sumber hukum *fiqh siyāsah dustūrīyah* yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Saw serta kebijakan *ulil amri* serta kebiasaan suatu negara yang tidak melanggar syariat agama. Di dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 58 berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعُظُّكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Bagi Agama Islam, kepemimpinan (*Imāmah*) ialah pondasi yang mengokohkan dan menguatkan prinsip-prinsip agama, dan mengatur kepentingan-kepentingan umum, urusan rakyat berjalan dengan normal, dan kekuasaan khusus lahir dari padanya.¹⁴

Fiqh siyāsah dustūrīyyah mencakup beberapa pembahasan dan bidang-bidang kehidupan yang bersifat sangat luas dan kompleks yakni, mengenai persoalan *imāmah*, hak dan kewajibannya; mengenai persoalan rakyat, status, dan hak-haknya; mengenai persoalan *bai’at*; mengenai persoalan *waliyul ‘ahdi*; mengenai persoalan perwakilan; mengenai persoalan *ahlul ḥalli wal ‘aqdi*; persoalan *wuzāroh* dan perbandingannya.

¹³Lihat QS. An-Nissa ayat 58

Ahl Al-Halli Wal-'Aqd merupakan pelaksana kekuasaan legislative. *Ahl Al-Halli Wal-'Aqd* secara harfiah berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli *fiqh siyāsah* merumuskan pengertian *Ahl Al-Hall Wal-'Aqd* sebagai orang yang memiliki wewenang untuk memutuskan dan

Dengan kata lain, *Ahl Al-Halli Wal-'Aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Anggota *Ahl Al-Halli Wal-'Aqd* terdiri dari orang yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain bertugas menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.²⁰ Unsur-unsur legislasidalam *fiqh siyāsah* dapat dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam,
 - (2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakan,
 - (3) Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai dasar syariat Islam.²¹
- a. Bidang *siyāsah tanfidziyyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imāmah*, persoalan *bai'ah*, *wuzāroh*, *waliy al-ahdi*, dan lainlain. Lembaga eksekutif

²¹Imam Amrusi Jailani dkk, *Hukum Tata Negara Islam...*, 26.

b. Bidang *siyāsah Qadlā'īyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.²³ Kekuasaan (*sulṭah*) dalam negara Islam, Abdul Wahab Khallaf membaginya menjadi tiga bagian, pertama, Lembaga Legislatif (*sulṭah tasyrī'īyyah*) merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kedua, lembaga eksekusif (*sulṭah tanfīdīyyah*) merupakan lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang.

²³ Ahmad Djazuli, *Fiqh Siyāṣah...*, 48.

Adapun mengenai pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya hak, melindungi orang yang kehilangan hak-haknya , mengawasi harta wakaf dan lain-lain. Tujuan pengadilan dalam Islam bukanlah untuk mengorek kesalahan agar dapat dihukum, tetapi yang menjadi tujuan pokok yaitu menegakkan kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan salah.²⁴

Tugas *al-sulṭḥah al-Qādlaiyyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah di ciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilāyahal-ḥisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilāyahal-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah *al-mazhālim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan

melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta pembuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat.²⁵

- c. Bidang *siyāṣah idāriyyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian. Dalam *siyāṣah idāriyyah*, untuk mengukur kualitas pelayanan dapat diambil dari kualitas kepentingan pelayanan itu sendiri. Untuk merealisasikan kebaikan atau kesempurnaan dalam melaksanakan pelayanan administrasi terdapat tiga indikator yaitu “sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional dalam penanganan”.

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan daripada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:

- (1) Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoretis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang di serahi tugas untuk menjalankan pemerintah. Sedangkan para ulama dan fuqaha menitikberatkan perhatian dan menyelidikannya kepada hal-hal yang praktis
- (2) Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula

²⁵ Muhammad iqbal, *Fiqh Siyasa*..., 137.

pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat untuk negara

(4) Fakta sejarah dalam Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama dipersoalkan oleh umat Islam setelah Rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.

(5) Masalah yang timbul dan terjadi tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul dan tenggelamnya pemerintahan dari pada unsur – unsur negara yang lainnya.

B. Siyāsah Māliyah

Siyāsah Māliyah ialah kajian yang tidak asing lagi dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad Saw. *Siyāsah māliyah* merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, di dalam kajian tersebut antara lain dibahas tentang sumber-sumber pendapatan negara dan

Fiqh siyāsah māliyah di dalam perspektif Islam tidaklah lepas dari *Al-Qur'an*, sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh khulafah serta pemerintahan Islam sepanjang sejarah. *Siyāsah māliyah* ini merupakan kajian yang tidak asing di dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad Saw. *Fiqh siyāsah māliyah* merupakan salah satu bagian terpenting di dalam sistem pemerintahan agama Islam dikarenakan menyangkut anggaran pendapatan dan menyangkut belanja negara.²⁷

Fiqh siyāsah Māliyah memiliki sumber yakni Al-Qur'an. Yang mana dalam menyelesaikan masalah mengenai keuangan negara dan pendapatan negara. Ayat di bawah ini merupakan sumber Al-Quran yang mengenai *fiqh siyāsah Māliyah* yakni surat Al-hasyr ayat 7

²⁷ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta:Gaya Media Pratama,2001), 273.

3. Ruang lingkup *Siyāṣah Māliyah*

²⁸Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam I* (Jakarta:PT Ichtiar Baru Van Hoeve,1996), 188.

Siyāṣah Māliyah memiliki aspek yang sangat penting dalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan yang diperuntukkan untuk kemashlahatan masyarakat. Ruang lingkup ini yakni gambaran bagaimana cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan antara orang yang kaya dan orang yang miskin, agar kesenjangan antara orang yang kaya dan orang yang miskin tidak semakin melebar.²⁹

a. Hak Milik

Dalam agama Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta kekayaan yang telah dihasilkan tidak melanggar hukum syara. Yang mana di dalam Islam telah menetapkan cara melindungi harta milik ini dari pencurian, hasil dari perampokan, hasil dari perampasan yang dilengkapi dengan saksi. Seorang pemilik harta juga memiliki hak menasarufkan hartanya dengan cara menjualnya, dengan cara menyewakannya, mewasiatkannya, menggadaikan atau memberikan sebagian dari hak-hak ahli waris.³⁰

b. Zakat

Zakat merupakan bagian dari salah satu rukun Islam dan hukumnya wajib atau fardhu ‘ain. Zakat adalah rukun Islam yang ke empat. Sesungguhnya zakat itu dapat membersihkan manusia dari sifat keirian dan

²⁹ Tasbih, “Kedudukan dan fungsi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam”, (Jurnal Al-FIKR,3,2010), 332.

³⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi...*, 20.

cinta yang berlebih-lebih kepada harta dan benda yang mampu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati manusia dan memperkembangkan harta bendanya. Zakat meliputi zakat mal yang di dalamnya terdiri atas binatang ternak, emas, dan perak biji makanan yang mengenyangkan buah-buahan, dan harta perniagaan, zakat rikaz dan zakat fitrah.³¹

c. *Ghanīmah*

Ghanimah merupakan harta yang diperoleh hasil rampasan dari orang-orang kafir melalui peperangan. Penjelasan ini terdapat pada Al-Qur'an surat *Al Anfal* ayat 1, yakni Allah Berfirman

“mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, harta dari rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertakwalah hanya kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama, dan taatlah hanya kepada Allah dan rasulNya jika kamu adalah orang-orang yang beriman”

d. Jizyah

Jizyah merupakan iuran negara yang diwajibkan atas orang ahli kitab yang mana sebagai imbalan bagi usaha membela mereka dan untuk melindungi mereka atau untuk segi imbalan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh oleh orang-orang Islam sendiri baik di dalam kemerdekaan diri, dari pemeliharaan harta, dari kehormatan, dan dari agama. *Jizyah* menurut Hasbi Ash-Shiddieqy yakni pajak yang diwajibkan keadaan semua orang non muslim laki-laki, merdeka dan yang sudah dewasa, sehat dan yang

³¹Ali Ridho, “Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab”, (Jurnal Al-‘Adl--2 juli,2013), 5-6.

Soetardjo Kartohadi Koesomo menyebut desa asalnya dari perkataan Sankskrit yang mana artinya adalah tanah air, tanah asal, tanah kelahiran. Perkataan desa hanya dipakai di bali, di Jawa, di Madura. Dusun dipakai di Sumatera Selatan. Dan di Maluku orang mengenal nama dusun-dati sebutan dari desa. Dan di Aceh orang memakai nama gampong dan meunasah khusus untuk daerah hukum yang paling bawah.³³

1. Pengertian sosiologis yang mana menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau kesatuan sebuah komunitas penduduk yang tinggal dan yang menetap dalam suatu lingkungan yang mana mereka saling mengenal dan bergantung kehidupannya dengan alam.

³³Soetardjo Kartohadikoesoemo, *Desa...*, 15.

Pemerintah desa mempunyai kewenangan dalam mengelola apa yang mereka miliki untuk mensejahterakan masyarakat setempat. Desa merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mencapai tujuan dan dari sebuah pembangunan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang kepada desa berupa kewenangan yang tampak lebih besar dan lebih luas untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan demokratis, seperti kebebasan dalam melibatkan masyarakat dalam semua proses baik dalam proses pengambilan keputusan berskala desa maupun perencanaan dan proses pelaksanaan pembangunan desa.³⁴

Dasar hukum mengenai pengaturan Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang mana Desa memiliki semangat *self local government*. Lebih rinci, mengenai pengaturan dasar hukum Desa salah satunya yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dalam perkembangannya selama ini, pemerintah telah banyak mengeluarkan berbagai regulasi yang menjadi turunan dari undang-undang Desa tersebut. Yang mana bermula dari Peraturan Presiden, yakni :

- Dari kedua Peraturan Presiden ini menjadi akar masalah dalam aspek regulasi yang ada di Indonesia ini. Undang-undang Desa memiliki empat lingkup pembahasan mengenai desa yakni mengenai pemerintahan, mengenai pemberdayaan masyarakat, mengenai pembangunan Desa, dan mengenai pembinaan kemasyarakatan. Keempat lingkup pembahasan mengenai desa berada di satu sumber yakni undang-undang Desa yang kemudian dibagi ke dalam dua peraturan presiden tersebut, yakni menjadi kewenangan Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Desa.

Salah satu contoh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni di pasal 1 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 menghapus ketentuan menteri adalah menteri yang menangani desa. Penghapusan ketentuan ini sama halnya dengan menghapus ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 angka 16 yakni Menteri adalah menteri yang menangani desa.³⁵

³⁵Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

3. Bab III pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016

Bab III membahas mengenai tukar menukar aset desa. Aset desa di sini berupa tanah yang mana pada bagian kesatu mengenai tukar menukar aset desa untuk kepentingan umum. Bagian kedua mengenai tukar menukar aset desa bukan untuk kepentingan umum dan yang bagian ketiga mengenai tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan kepentingan umum.

4. Bab IV pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016.

Membahas mengenai pembinaan dan pengawasan

5. Bab V pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 membahas tentang pembiayaan. Yang mana dijelaskan bahwasanya dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset desa, pembiayaan di bebaskan pada APB desa.

6. Bab VI pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 membahas tentang ketentuan peralihan. Pengelolaan aset desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindah tanganan yang sudah berjalan dan atau sedang dalam proses sebelum ditetapkan peraturan

menteri ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan menteri ini.

7. Bab IV pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 membahas tentang ketentuan lain-lain.
8. Bab V pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 membahas tentang ketentuan penutup yang mana ketentuan yang mengatur mengenai aset desa wajib menyesuaikan dan berpedoman dengan peraturan menteri ini paling lambat satu tahun sejak pada peraturan menteri ini ditetapkan.

Namun dalam masalah yang diangkat ini terfokus ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 tahun 2016 yakni Bab iii mengenai tukar menukar bagian ketiga yang isnya mengenai Tanah Kas Desa Selain Untuk Kepentingan Umum dan Bukan Untuk Kepentingan Umum pasal 42 ayat 3 poin a “tukar menukar tanah milik desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar”.

PENGELOLAAN ASET DESA TERHADAP ALIH FUNGSI TANAH KAS DESA DI GAYAM BOJONEGORO

1. Asal Usul Desa Gayam

2. Letak dan Keadaan Geografis

¹ Arsip-Arsip Administrasi Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, *Profil Desa Gayam*, 10 April 2019.

893 Ha. Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro merupakan bagian integral dari sistem Perwilayahan kecamatan Gayam. Dengan batas wilayah:

- (1) Sebelah Utara : Desa Katur, Desa Ringin Tunggal, Desa Begadon, Desa Brabowan
- (2) Sebelah Timur : Desa Jelu, Desa Bareng, Desa Ngantru
- (3) Sebelah Selatan : Desa Mojodelik, Desa Bandung Rejo
- (4) Sebelah Barat : Desa Mojodelik

terbagi dalam beberapa Dusun yang terdiri dari :

- (1) Dusun Gayam ada 2199 jiwa dengan jumlah KK 704
- (2) Dusun TemlokoRejo ada 1062 jiwa dengan jumlah KK 358
- (3) Dusun Kali Glonggong ada 618 jica dengan jumlah KK 210
- (4) Dusun Sumur Pandan ada 2654 jiwa dengan jumlah KK 891.²

Desa gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro merupakan Desa yang terletak cukup strategis. Akses menuju Desa Gayam pun sangat mudah. Jaringan jalan dan transportasi atau akses jalan menuju ke Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro sudah aspal dan sudah ada yang menggunakan cor-cor an. Jalan aspal adalah satusatunya jalan yang menghubungkan ke ibukota Kecamatan. Tidak ada transportasi umum yang masuk ke Desa Gayam. Sedangkan transportasi lokal adalah kendaraan

² Arsip-Arsip Administrasi Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, *Profil Desa Gayam*, 11 April 2019.

Jumlah penduduk Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro sebanyak 6553 orang dengan jumlah KK sebanyak 2163 KK. Sebagian besar mata pencarian dari mereka adalah petani, dan sebagian lainnya peternak, pedagang, pengrajin dan usaha kecil termasuk juga PNS, TNI dan POLRI.⁵

⁵Ibid.

- a. Wilayah Desa Gayam terbagi dalam beberapa Dusun yang terdiri dari :

- (1) Dusun Gayam ada 2199 jiwa dengan jumlah KK 704
- (2) Dusun Temloko Rejo ada 1062 jiwa dengan jumlah KK 358
- (3) Dusun Kali Glonggong ada 618 jiwa dengan jumlah KK 210
- (4) Dusun Sumur Pandan ada 2654 jiwa dengan jumlah KK 891

B. Strukur Pemerintahan Desa Gayam

1. Kepala Desa di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro yakni bapak winto.⁶

Tugasnya :

- 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa dengan baik di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.
- 2) Melaksanakan Pembangunan Desa agar desa lebih maju dan berkembang dan tidak kalah jauh dengan desa yang lain
- 3) Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro
- 4) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat Desa Gayam
- 5) Menjaga hubungan antara kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga yang lain.

2. Sekertaris desa atau Carik sebutan Jawa di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro yakni bapak Narito.⁷ Yang mana

⁶Winto, *Wawancara*, di Kantor Kepala Desa Gayam, 14 Februari 2019.

- 5) Pelaksanaan tentang upaya perlindungan masyarakat sekitar
 - 6) Mengenai kependudukan
 - 7) Mengenai penataan dan pengelolaan wilayah desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro
 - 8) Mengenai pendataan dan pengelolaan tentang profil desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro
- b. Kasi Kesejahteraan Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro yakni ibu Mas'ula.⁹

Yang tugasnya:

- 1) Melaksanakan tugas tentang pembangunan sarana dan prasarana serta tentang kesejahteraan masyarakat Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro
- 2) Mengenai pembangunan bidang pendidikan
- 3) Mengenai Kesehatan. baik kesehatan Perangkat Desa maupun masyarakat Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro
- 4) Melaksanakan tugas mengenai pemberdayaan sebuah keluarga, pemuda atau karang taruna dan olahraga di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro

⁹ Arsip-arsip Administrasi Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, *Profil Desa Gayam*, 10 April 2019.

- c. Kasi Pelayanan Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro yakni bapak Samin.

Yang tugasnya melaksanakan penyuluhan dan ikut serta memotivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa dan menyusun laporan seksi pelayanan, serta meningkatkan upaya partisipasi di masyarakat, dan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro

4. Kaur Di Desa Gayam kecamatan Gayam kabupaten Bojonegoro
- a. Kaur Tata Usaha dan Umum di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro yakni Bapak Samiran.¹⁰

Yang tugasnya:

- 1) Mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro
- 2) Mempunyai tugas penataan administrasi perangkat desa di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro
- 3) Sebagai penyedia prasarana perangkat desa dan kantor. Yakni kantor pemerintahan Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro

¹⁰ Arsip-arsip Administrasi Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, *Profil Desa Gayam*, 10 April 2019.

- 4) Penyiapan segala bentuk Rapat yang ada di Kantor Pemerintahan Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro
 - 5) Sebagai pengadministrasian aset desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro
 - 6) Inventarisasi Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro
 - 7) Mengatur segala perjalanan Dinas
 - 8) Pelayanan umum di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro
- b. Kaur Keuangan Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro yakni Ibu Devi Riana Ulfa.¹¹
- Yang tugasnya sebagai pengurusan administrasi tentang keuangan pemerintahan desa dan serta melaksanakan pengurusan administrasi segala sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintahan desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.
- c. Kaur Perencanaan Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro yakni Bapak Eko Sarjono
- Yang tugasnya sebagai koordinasi urusan tentang perencanaan pemerintahan desa dan melaksanakan penyusunan rencana anggaran

¹¹ Devi, *Wawancara*, di Kediaman Kasi Keuangan, 11 April 2019

Pada tahun 2010 negara membutuhkan tanah untuk eksploitasi minyak dan gas bumi yang kebetulan titik minyak terbesar berada di wilayah Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. Yang mana SKK Migas merupakan operator Negara Indonesia untuk meng handle atau memegang penuh pengelolaan eksploitasi minyak dan gas bumi yang ada di Kabupaten Bojonegoro. SKK migas merupakan Operator atau Kontraktor yang mengelola minyak di lapangan Banyu urip. Yang di kelola oleh SKK Migas merupakan Proyek dari negara.¹²

Negara membutuhkan tanah untuk Eksploitasi minyak dan Gas bumi sekitar 700ha. Yang mana di dalam luas tanah itu terdapat Tanah Kas Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro seluas sekitar 128,538m2 atas nama pemerintah Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. Dengan uraian :¹³

- Tanah kas desa atau bengkok Djogoboyo VI seluas 7,455m²
- Tanah kas desa atau bengkok Modin II seluas 5,380m²
- Tanah kas desa atau bengkok Kebajan I seluas 15,389m²
- Tanah Desa (petinggi) seluas 7,571m²
- Tanah kas desa atau bengkok Kamituwo III seluas 14,625m²
- Tanah kas desa atau bengkok Kebajan III seluas 15,127m²

¹²Winto, *Wawancara*, di kediaman Kepala Desa, 22 mei 2019.

¹³ Arsip-Arsip Administrasi Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro tanggal 20 Mei 2019.

- nah kas desa atau bengkok Modin II seluas 3,94
nah kas desa atau bengkok Kamituwo II seluas
nah kas desa atau bengkok kebajan I seluas 5,26
nah kas desa atau bengkok kebajan I seluas 2,06
sisanya merupakan tanah milik warga dan ta
dekatan dengan proyek negara yang dioperato
Karena yang memerlukan tanah tersebut adalah
yam memberikan Tanah Kas Desa yang di
dengan persyaratan negara mengganti tanah
tanah yang baru. Karena dari pemerintahan des

nah kas desa atau bengkok Modin II seluas 3,94
nah kas desa atau bengkok Kamituwo II seluas
nah kas desa atau bengkok kebajan I seluas 5,26
nah kas desa atau bengkok kebajan I seluas 2,06
sisanya merupakan tanah milik warga dan ta
dekatan dengan proyek negara yang dioperato
Karena yang memerlukan tanah tersebut adalah
yam memberikan Tanah Kas Desa yang di
dengan persyaratan negara mengganti tanah
tanah yang baru. Karena dari pemerintahan des

nah kas desa atau bengkok Modin II seluas 3,94
nah kas desa atau bengkok Kamituwo II seluas
nah kas desa atau bengkok kebajan I seluas 5,26
nah kas desa atau bengkok kebajan I seluas 2,06
sisanya merupakan tanah milik warga dan ta
dekatan dengan proyek negara yang dioperato
Karena yang memerlukan tanah tersebut adalah
yam memberikan Tanah Kas Desa yang di
dengan persyaratan negara mengganti tanah
tanah yang baru. Karena dari pemerintahan des

- ¹⁶ Arsip-Arsip Administrasi Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, *Hasil Musyawarah Desa*, tanggal 20 Mei 2019.

Namun dengan adanya rapat evaluasi itu belum membuahkan

Gayam Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut :¹⁹

No	Pemilik Tanah Sesuai Pengajuan	Lokasi	
1	Umiyati	Desa Gayam	2,
2	Sarti cs	Desa Gayam	1,
	Kamidin	Desa Gayam	1,
4	Kamidin	Desa Gayam	1,
5	Kamidin	Desa Gayam	3,
6	Kamidin	Desa Gayam	4,

¹⁹,"*Resume Penilaian Tanah Calon Pengganti TKD Gayam*", Kantor Jasa Penilai Publik Abdullah Fitriantoro 7 Rekan, tanggal 23 mei 2019

44	Kamidin	Desa Gayam	3,820
45	Kamidin	Desa Gayam	1,405
46	Kamidin	Desa Gayam	1,111
47	Kamidin	Desa Gayam	2,394
48	Kamidin	Desa Gayam	2,992
49	Kamidin	Desa Gayam	9,165
50	Kamidin	Desa Gayam	2,031
51	Kamidin	Desa Gayam	1,901
52	Kamidin	Desa Gayam	2,620
53	Kamidin	Desa Gayam	1,571
54	Kamidin	Desa Gayam	5,468
55	Kamidin	Desa Gayam	2,605
56	Kamidin	Desa Gayam	2,465
57	Kamidin	Desa Gayam	1,861
58	Kamidin	Desa Gayam	3,717
59	Wardi	Desa Gayam	2,607
60	Kamidin	Desa Gayam	3,505
61	Kamidin	Desa Gayam	5,970
62	Kamidin	Desa Gayam	1,689
63	Kamidin	Desa Gayam	1,507
64	Kamidin	Desa Gayam	1,540
65	Yaijan	Desa Gayam	10,729
66	Kamidin	Desa Gayam	2,753
67	Kamidin	Desa Gayam	1,976
68	Kamidin	Desa Gayam	2,409
69	Muntari	Desa Gayam	1,819
70	Kamidin	Desa Gayam	1,622
71	Romlah	Desa Gayam	6,772
72	Pasir	Desa Gayam	2,267
73	Sarinah	Desa Gayam	5,423

1. Data Tanah Kas Desa Gayam Kecamatan Gayam yang terkena proyek pengembangan lapangan banyu urip yakni :²⁰

No	Uraian	Luas (m2)	NIB	Total Appraisal (Rp)
1	Tanah Kas Desa atau Bengkoko Djogoboyo	7,455m2	01276	4,256,712,000
2	Tanah Kas Desa atau Bengkoko Modin II	5,380m2	01277	3,072,776,000
3	Tanah Kas Desa atau Bengkoko Kebajan I	15,389m2	01278	8,563,375,000
4	Tanah Kas Desa atau Bengkoko (petinggi)	7,571m2	01283	4,322,898,000
5	Tanah Kas Desa atau Bengkoko Kamituwo III	14,625m2	01284	8,138,906,000
6	Tanah Kas Desa atau 01282Bengkoko	15,127m2	01268	8,417,811,000

²⁰ Arsip-Arsip Administrasi Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, tanggal 23 Mei 2019.

1. Segera menindaklanjuti persetujuan Gubernur Jawa Timur dengan memperhatikan poin-poin pokok yang tertuang dalam surat Gubernur Jawa Timur dimaksud yaitu:
 - a. Bahwa, selisih nilai tukar menukar tanah milik Desa Gayam sejumlah Rp 145.301.978,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang dibayarkan melalui Rekening Kas Desa, dalam pelaksanaannya dituangkan kedalam anggaran pendapatan dan Belanja Desa sesuai ketentuan yang berlaku dan digunakan sesuai ketentuan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 18 tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Desa.

- Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupa
n terbitnya sertifikat tanah pengganti atas
n, menjadi beban dan tanggung jawab
ana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
elanjutnya sebagaimana dimaksud pada a
kan ketentuan pasal 34 ayat (2) huruf d pe
omor 1 Tahun 2016 tentang pengelol
ernur memberikan persetujuan, selar
n peraturan desa tentang tukar menuk
ra saudara bersama BPD Gayam segera mer

tanah pengganti yang berada di dalam wilayah Desa Gayam dengan luasan total 204,152 m².

3. Melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut persetujuan Gubernur Jawa timur sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 kepada Bupati Bojonegoro melalui kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Bojonegoro dengan tembusan Camat Gayam dan Bpd Gayam.

Dalam proses ini, karena memakan waktu yang amat panjang sekitar kurang lebih 7 tahun. Dan menunggu mendapatkan tanah pengganti untuk tanah kas desa gayam yang digunakan oleh negara yang dioperasikan oleh SKK migas. Terdapat persetujuan antara pemerintah Desa Gayam dan SKK migas. Bahwa sanya tanah yang sudah digunakan disewa dengan SKK migas memberikan uang kepada pihak pemerintahan desa gayam hingga ditemukannya tanah pengganti untuk pemerintah Desa Gayam. Sewa menjadi pilihan kesepakatan yang telah dibuat karena tanah kas desa merupakan salah satu aset kekayaan desa di Desa Gayam yang diperuntukkan sebagai pendapatan desa. Jikalau salah satu aset kekayaan desa yang dapat menambah pendapatan desa terpakai, maka Desa Gayam akan mengalami kerugian. Maka dari itu dari pemerintah Desa Gayam mengambil jalan keluar yakni menyewakan tanah kas desa tersebut. Biaya atau uang sewa yang diberikan oleh SKK migas bukan digunakan untuk perangkat desa tetapi untuk pembangunan dan perkembangan Desa Gayam. Dan secara

Pada akhirnya ketika semuanya sudah disetujui oleh pihak negara dan pemerintahan desa, mengenai tanah kas Desa Gayam Kecamatan Gayam yang digunakan oleh negara dan di operator oleh Skk migas. Penyelesaian tukar menukar tanah kas desa yang dimulai pada tahun 2010 selesai pada tahun 2018. Meskipun memakan waktu yang lama. Namun, semuanya berjalan dengan lancar dan pihak desa dapat mendapatkan tanah pengganti sesuai dengan yang diharapkan.

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* DAN PERMENDAGRI NO.1 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA TERHADAP ALIH FUNGSI TANAH
KAS DESA DI GAYAM BOJONEGORO**

Sebagaimana yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengelolaan aset desa yakni tanah kas desa di Desa Gayam yang dibutuhkan oleh negara yakni yang dioperatori oleh SKK Migas yang digunakan untuk pengembangan eksploitasi minyak dan gas bumi. Pada prinsipnya Pemerintahan Desa Gayam menyetujui penggunaan tanah kas desa milik Desa Gayam untuk digunakan sebagai pengembangan eksploitasi minyak dan gas bumi. Tanah kas desa merupakan salah satu aset desa yang dapat menambah hasil pendapatan desa. Entah itu digunakan untuk bercocok tanam maupun disewakan kepada warganya.

a. Tanah yang di gunakan harus kembali ke tanah

- b. Luasan tanah sekurang-kurangnya 150% dari tanah kas desa yang digunakan
- c. Tanah pengganti berbentuk hamparan menyatu dalam satu lokasi sekurang-kurangnya seluas 10h untuk tanah yang akan digunakan sebagai tanah kas desa area persawahan
- d. Memiliki kualitas tanah yang mendukung kegiatan pertanian padi dua kali panen dalam satu tahun
- e. Memiliki fasilitas pendukung untuk pengairan atau cadangan air dimusim kemarau
- f. Memiliki akses penghubung dengan jalan utama poros desa dengan kata mudah tanah pengganti berada di pinggir jalan
- g. Kondisi tanah pengganti harus sudah merupakan tanah yang siap untuk memproduksi pertanian
- h. Untuk tanah pengganti tanah kas desa yang berupa lapangan desa, harus memenuhi luas minimal sebagai lapangan sepak bola berikut fasilitasnya, dan serta lokasinya berdekatan (maksimal 100 meter) dari lokasi lapangan Desa saat ini
- i. Biaya administrasi seluruhnya di tanggung oleh SKK Migas

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Yang terdapat pada pasal 42 ayat 3 poin “a” memaparkan bahwasanya “tukar menukar tanah kas desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar”. Dalam hal ini pihak desa

am wilayah Desa Gayam dengan luasan total 204,152 m².
 praisal Rp 73,021,988,100. Disini sudah jelas ada perbedaan
 tanah pengganti. Memang dari pihak desa tidak dirugikan
 an tanah namun dalam nilai appraisal dari tanah pengganti
 a tanah yang digunakan. Hingga terdapat selisih nilai
 301,900.

***Siyāsah* tentang Pengelolaan Aset Desa**

Agama Islam terkenal istilah mengenai *fiqh*. *Fiqh* adalah ilmu
qh yang membahas mengenai masalah kenegaraan baik dari segi
 pemerintahan, dan kepemimpinan. *Fiqh* disini yang

Siyāsah tentang Pengelolaan Aset Desa

Siyāsah tentang Pengelolaan Aset Desa

material pokok-pokok perundangan yang berkaitan dengan hubungan rakyat dan pemerintah mengenai kemashlahatan umat.¹

1. *Al-Suṭhan al-Tanfīdziyyah* merupakan *fiqh* yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbas kepada kemashlahatan umat secara langsung. Kebijakan dari pemerintah ini merupakan penjabaran jelas dari perundang-undangan terkait dengan obyek yang dibuat oleh legislatif. Disini pemerintah memegang peran penting didalam roda pemerintahan negara yakni untuk mengatur kesejahteraan rakyatnya melalui undang-undang.

Tugas dari *Al-sulḥah al-Tanfidziyyah* yakni melaksanakan undang-undang. Dalam konteks ini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang berhubungan dengan sesama negara yakni hubungan internasional.²

Pelaksana tertinggi dari kekuasaan ini adalah pemerintah yakni kepala negara yang dibantu oleh para pembantunya yakni kabinet maupun dewan menteri yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam yang lainnya. Sebagaimana halnya yakni kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari

¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada 2001). 154.

²Ibid., 62.

semangat nilai-nilai dari ajaran Islam, yakni kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan nilai semangat nash dan kemashlahatan.³

Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemashlahatan. Yang mana kebijakan pemerintah dalam arti luas ini disebut dengan undang-undang dan segala aturan di bawah hirarki peraturan perundang-undangan. Yang bertolak belakang dengan cita-cita hukum syara dan juga merugikan kemashlahatan umum, maka kebijakan ulil amri ini harus dikembalikan ke hukum syara maupun hadits nabi, agar kebijakan tersebut sesuai dengan konstitusi hukum syara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa pada Bab III yakni tukar menukar. Dan pada bagian ketiga tentang tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan kepentingan umum tepatnya pada pasal 42 ayat 3 poin a, yakni “tukar menukar tanah milik desa dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar.

Namun, Pada proses ini belum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Yang mana dalam proses mengganti tanah yang digunakan untuk eksploitasi minyak dan gas bumi tidak memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 pasal 42 ayat 3 point “a”. Kebijakan yang telah ditetapkan dari pihak SKK migas

³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*..., 137.

maupun Pemerintah Desa Gayam tidak sesuai dengan surat an-nisa ayat 58 dalam pengolahan aset desa yang mana disini terfokus dalam penggunaan tanah kas desa untuk pengembangan eksploitasi minyak dan gas bumi. Memang dari pihak desa tidak dirugikan untuk masalah luasan tanah namun dalam nilai appraisal dari tanah pengganti lebih kecil daripada tanah yang digunakan. Hingga terdapat selisih nilai appraisal yakni Rp 145,301,900.

Siyāṣah Māliyah merupakan bagian terpenting di dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut mengenai anggaran pendapatan maupun belanja negara. *Fiqh siyāṣah māliyah* fokus terhadap kemashlahatan rakyat dengan rakyat, mengenai harta kekayaan dan pemerintah maupun kekuasaan. Yang mana dalam etimologi menjelaskan bahwasanya *fiqh siyāṣah māliyah* merupakan sesuatu yang mengatur politik keuangan.

Baitul mal disini bertugas untuk mengawasi kekayaan negara yakni terutama pemasukan maupun pengelolaan ataupun pengeluaran dan lain-lain. Termasuk kebutuhan warga dan negara yakni kebutuhan untuk orang fakir miskin, kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan dan keamanan negara, kebutuhan yakni juga untuk membiayai sektor pendidikan di dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan mempunyai ilmu pengetahuan, kebutuhan untuk membayar gaji pegawaiidn pejabat negara, kebutuhan untuk pengembangan infrastruktur sarana prasarana fisik, kebutuhan untuk meningkatkan

kesehatan masyarakat dan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan umum maupun pemerataan pendapatan kekayaan.

Bahwasannya dalam pengelolaan aset desa yang terfokus dalam alih fungsi tanah kas desa yang digunakan untuk pengembangan eksploitasi minyak dan gas bumi di Desa Gayam Kecamatan Gayam. Ada kesepakatan yakni pemerintah Desa Gayam mendapatkan biaya kontrak atas tanah yang digunakan sampai adanya tanah pengganti untuk tanah kas desa yang digunakan untuk pengembangan eksploitasi minyak dan gas bumi. Hasil dari itu langsung masuk ke rekening pemerintah Desa Gayam Kecamatan Gayam. Dan dana hasil kontrak itu bukan semata-mata untuk aparatur desa namun uang tersebut kembali lagi untuk rakyat. Begitupun untuk tanah pengganti yang sudah resmi milik pemerintah Desa Gayam dikelola untuk dilelang kepada masyarakat yang ingin mengelola tanah dengan sistem sewa. Itupun dana hasil sewa juga masuk langsung ke rekening pemerintah Desa Gayam. Tujuannya juga sama Yakni untuk pembangunan infrastuktur, pembangunan kesehatan dan lain-lain yang memiliki satu tujuan yaitu kesejahteraan dan mensejahterakan masyarakat. Karena kita ketahui bahwasanya pengelolaan aset desa juga termasuk pendapatan asli desa.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dilakukan serta dengan diperkuat data yang ditemukan di lapangan terhadap penelitian pengelolaan aset desa terhadap alih fungsi tanah kas desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 di Desa Gayam Kecamatan Gayam Bojonegoro, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan aset desa khususnya tanah kas desa di Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro dialih fungsikan sebagai pengembangan eksploitasi minyak dan gas bumi.
2. Dalam mengganti tanah kas tersebut tidak memperhatikan dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016. Tanah kas Desa Gayam yang digunakan untuk eksploitasi minyak dan gas bumi memiliki luas sekitar 128,538m² dengan nilai appraisal Rp 73,167,290,000, ditukar atau diganti dengan 67 (enam puluh tujuh) bidang tanah pengganti yang berada di dalam wilayah Desa Gayam dengan luasan total 204,152 m² dengan nilai total appraisal Rp 73,021,988,100. Hingga terdapat selisih nilai appraisal yakni Rp 145,301,900 lebih murah dari tanah asal.

3. Dari kajian aspek *al-sulḥah al-Tanfīdziyyah* yakni pelaksana undang-undang. Dalam hal ini pemerintah Desa Gayam tidak melaksanakan undang-undang dengan baik. Dan dari kajian aspek *siyāsah māliyah* yakni *baitul māl* disini bertugas untuk mengawasi kekayaan negara yakni terutama pemasukan maupun pengelolaan ataupun pengeluaran dan lain-lain, sudah sesuai hasil sewa lahan masuk pada kas Desa Gayam

B. Saran

Dari hasil kesimpulan tentang analisis *fiqh siyāsah* dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa terhadap alih fungsi tanah kas desa di gayam Bojonegoro. Demi meningkatkan pengelolaan aset desa dengan baik dari penulis dapat memberikan sarah bahwasanya:

1. Pemerintah Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.
Diharapkan lebih memperhatikan peraturan maupun undang-undang tentang Pengelolaan Aset Desa agar lebih sesuai dan tidak menyimpang dengan aturan yang ada.
2. Pemerintah Desa Gayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro dapat membuka usaha di tanah pengganti yang baru agar bisa mendapatkan penghasilan yang langsung masuk ke rekening kas desa selain itu agar bisa memperdayakan remaja desa yang belum memiliki pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Bratakusumah, Daddy Supriady. *otonomi penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam I*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah. Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Furchan, A. *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004.
- Hakim, Bisryi. *Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Kabupaten Kendal (studi Kasus di Desa Pasigitan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)*. (skripsi— Universitas Negeri Semarang, Tahun 2015).
- Hidayati, Endar. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tanah Kas Desa di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman*. Tesis, Program Magister Universitas Gajah Mada, 2012.
- Amrusi, Imam Jailani Dkk. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: CV. Mitra Media Nusantara, 2013.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Maududi, (AL) Abu A'la. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993.
- Mawardi, (AL) Imam, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah. *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Darul Falah, 2006.

- Mujar, Ibnu Syarif dan Zada Khamami. *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan & penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Nurhayati, Siti. *tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pengalihan Hak Pengelolaan Tanah Kas Desa Dengan Keputusan Perdes di Kediri (studi kasus di Desa Cendono Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)”,* Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007
- Pulungan, J. Suyuthi, fiqh Siyasah. *Ajaran, Sejarah Pemikiran*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 1994.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Rahmawati, Endah Tri, Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di desa Baturejo Kecamatan Bangutapang Kabupaten Bantul pdf. (diakses 20 mei 2019)
- Ridho, Ali. *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab*. Jurnal Al-‘Adl, 2 juli, 2013.
- Rojak, Jeje Abdul. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: CV Cahaya Intan Xii, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press, 2007.
- Soeratno, Lincollin Arsyad. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN*. Yogyakarta: 2008, 70.
- Tamwif, Irfan. *metodologi penelitian*. surabaya: UINSA Press, 2014.
- Tasbih. *Kedudukan dan fungsi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam*. Jurnal Al-FIKR, 2010.
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

Wiratama, Sujarweni V. *Metode Penelitian :Lengkap Praktis dan Mudah di Pahami*, Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2014.

Yabbar, Rahma. *tata kelola pemerintahan desa*. Surabaya: Penerbit Pustaka, 2015.